

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Penulis menguraikan kajian pustaka yang menjadi dasar dan sumber acuan untuk penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka ini diambil dari buku dan jurnal yang bersumber dari internet yang membahas mengenai teori dan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya.

2.1.1 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan turunan dari PDRB. Terdapat dua ukuran PDRB perkapita yaitu PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. PDRB perkapita atas harga konstan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi perkapita penduduk suatu wilayah (BPS). Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakatnya. Adapun formula PDRB perkapita sebagai berikut:

$$\text{PDRB perkapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

2.1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk suatu daerah pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Jika pertumbuhan penduduk di suatu daerah semakin meningkat dan lahan yang diciptakan terbatas, maka akan semakin banyak orang yang menganggur.

Tingginya pertumbuhan penduduk akan membawa berbagai masalah dan hambatan bagi pembangunan ekonomi, masalah ketenagakerjaan, hal ini dikarenakan kemampuan negara berkembang untuk menciptakan lapangan kerja baru sangat terbatas. Pertumbuhan penduduk biasanya dapat menimbulkan berbagai masalah seperti semakin meningkatnya jumlah pengangguran, struktur umur, dan urbanisasi (Subandi, 2011). Laju pertumbuhan penduduk di beberapa bagian dunia sangat tinggi, yang dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat, dan dapat menyebabkan kemiskinan dan kekurangan pangan.

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Penduduk

1. Teori Malthus

Dalam teori Malthus dikemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat disebabkan karena hubungan antara laki-laki dan perempuan yang akan menyebabkan kehamilan serta kelahiran tidak bisa dihentikan. Sementara di saat bersamaan, jumlah penduduk yang meningkat juga memerlukan pasokan pangan yang cukup. Malthus mengatakan bahwa jika tidak ada faktor penghambat, maka penduduk akan tumbuh menurut deret ukur sedangkan sumber-sumber pangan akan tumbuh seperti deret hitung. Dia juga mengatakan bahwa faktor yang menghambat perkembangan penduduk adalah *preventive chek* yaitu *moral restraint* dan *vice* serta *positive chek* yaitu *vice* dan *misery*. Dalam *preventive checks* pengurangan penduduk dilakukan menurunkan kelahiran melalui upaya-upaya untuk merekam nafsu seksual (*moral restraint*) dan pengurangan kelahiran melalui aborsi, homoseksualitas, *promiscuity dan adultery (vice)*.

Sedangkan *positive checks* Merupakan pengurangan penduduk melalui kematian yang meliputi kejahatan kriminalitas, dan pembunuhan (*vice*) serta melalui berbagai penyebab kematian seperti epidemik, bencana alam, kelaparan dan peperangan (*misery*).

Pada abad ke-19 kelompok anti Malthus menyampaikan kritik terhadap teori Malthus dengan argumen bahwa:

- a. Malthus tidak memperhitungkan kemajuan transportasi yang menghubungkan daerah satu dengan yang lain, sehingga pengiriman bahan makanan ke daerah yang kekurangan pangan mudah untuk dilaksanakan.
- b. Malthus tidak memperhitungkan kemajuan pesat dalam bidang teknologi terutama dalam bidang pertanian, karena pertanian dapat ditingkatkan dengan cepat dengan menggunakan teknologi baru.
- c. Malthus tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah. Artinya pengontrolan kelahiran yang diutarakan oleh Malthus dianggap tidak bermoral.
- d. Fertilitas akan menurun apabila terjadi perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk meningkat.

2. Teori Marxist

Aliran Marxist yang dicetuskan oleh Karl Mark dan Friedrich Engels, mengatakan terdapat tiga hal dalam kaitannya penduduk dan faktor yang mempengaruhi. Teori ini dulu banyak digunakan di negara-negara yang menganut paham sosialis seperti Cina, Vietnam maupun Korea Utara.

Dalam teorinya dikatakan bahwa:

- a. Jumlah penduduk tidak memberikan tekanan berarti terhadap peningkatan kebutuhan pangan tetapi lebih besar dampaknya bagi kesempatan kerja.
- b. Kemelaratan terjadi bukan karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tetapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian besar hak para buruh.
- c. Semakin tinggi tingkat jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula produktivitasnya. Hal ini terjadi jika teknologi tidak menggantikan tenaga kerja manusia. Sehingga manusia tidak perlu menekan jumlah kelahiran, dan ini berarti menolak teori Malthus tentang *moral restraint* untuk menekan angka kelahiran.

3. Teori Neo-Malthusian

Teori ini dikemukakan oleh Garrett Hardin dan Paul Ehrlich, dalam teorinya di abad ke-20, bumi yang pada zaman Maltus masih kosong mulai dipadati oleh manusia. Setiap minggu lebih dari 10 juta bayi diperkirakan lahir di dunia, sehingga semakin banyak manusia yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya. Sementara keadaan pangan terbatas dan kerusakan lingkungan semakin meningkat sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk. Aliran ini dilengkapi oleh Meadow dalam bukunya yang berjudul *The Limit to Growth* yang memperlihatkan hubungan antara variabel lingkungan yaitu penduduk, produksi pertanian, industri dan sumber daya alam serta polusi. Pertumbuhan penduduk dapat dibatasi dengan melakukan pembatasan kelahiran.

2.1.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk

1. *Fertilitas* (kelahiran) merupakan kemampuan seorang perempuan atau sekelompok perempuan secara riil untuk melahirkan atau hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan serta sebuah tindakan reproduksi yang menghasilkan kelahiran hidup. Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk di samping migrasi masuk. Kelahiran bayi membawa konsekuensi pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi tersebut, termasuk pemenuhan gizi, kecukupan kalori dan perawatan kesehatan. Pada gilirannya, bayi ini akan tumbuh menjadi anak usia sekolah yang menuntut pendidikan.
2. *Mortalitas* (kematian) merupakan salah satu diantara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Ukuran kematian menunjukkan suatu angka yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya suatu penduduk dalam suatu negara.
3. Migrasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Migrasi dari desa ke kota akan membawa dampak positif maupun negatif, dampak positif yaitu akan memberikan dampak modernisasi serta memperbaiki kehidupan para migran. Migrasi dapat mengubah pandangan dan perilaku orang, menambah keterampilan dan membuat seseorang lebih mempunyai inovasi, sedangkan dampak negatifnya adalah apabila pertumbuhan proporsi penduduk kota lebih tinggi dari laju pertumbuhan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesempatan kerja (Subri, 2003).

2.1.2.4 Menentukan Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan mendatang. Laju pertumbuhan penduduk geometrik menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya. Rumus laju pertumbuhan penduduk geometrik adalah sebagai berikut:

$$P_t = P_0(1 + r)^t$$

Keterangan:

P_t = jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = jumlah penduduk pada tahun dasar

t = jangka waktu

r = laju pertumbuhan penduduk

2.1.2.5 Dampak Pertumbuhan Penduduk

Dalam pembangunan ekonomi terdapat perpacuan antara perkembangan pendapatan riil dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini sangat penting karena pertumbuhan penduduk berkaitan dengan masalah persediaan bahan makanan dan sumber-sumber riil yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup dan akan mempengaruhi terhadap kualitas penduduk itu sendiri. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Dengan demikian yang menjadi permasalahan dan dalam pertumbuhan penduduk adalah tingginya tingkat jumlah penduduk di negara berkembang. Pertumbuhan

penduduk yang cukup tinggi ini dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi.

2.1.3 Dependency Ratio (Beban Ketergantungan)

Todaro (1995: 256) dalam bukunya yang berjudul ekonomi untuk negara berkembang mengatakan *dependency ratio* atau angka beban ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia nonproduktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15- 65 tahun). Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk suatu negara, maka semakin besar pula proporsi anak-anak yang menjadi tanggungan dan semakin sulit beban usia produktif yang bekerja untuk membantu yang tidak atau belum bekerja. Dengan kata lain, rasio ketergantungan (*dependency ratio*) secara makro dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Perhitungan *dependency ratio* menurut badan pusat statistik:

$$DR = \frac{P(0 - 14) + P65^+}{P(15 - 64)} \times 100$$

DR : Rasio Ketergantungan

P(0-14) : Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun)

P65⁺ : Jumlah penduduk usia tua (65 tahun keatas)

P(15-64) : Jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun)

Menurut Soegimo (2009: 39), tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a) Rendah: < 30
- b) Sedang: 31 – 40
- c) Tinggi: >41

2.1.4 Investasi

2.1.4.1 Pengertian Investasi

Investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2013: 121).

Bagi suatu negara, investasi tidak hanya untuk memaksimalkan *output*, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru. Adanya investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang. Penanaman modal swasta di Indonesia sudah dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal untuk kebutuhan dalam mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil

dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Undang-Undang ini sebagai revisi perubahan dari UU Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang sudah tidak sesuai dengan percepatan perekonomian dan perkembangan hukum nasional khususnya di bidang penanaman modal.

Menurut Sukirno (2005), kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

2.1.4.2 Teori Investasi

a. Teori Klasik

Dalam Lincolin (2010: 88-89), Teori ini menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Semakin cepat perkembangan investasi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk, maka semakin cepat perkembangan volume kapital rata-rata

per tenaga kerja. Semakin tinggi rasio kapital per tenaga kerja maka kapasitas produksi tenaga kerja cenderung semakin tinggi.

b. Teori Harrod Domar

Dalam Sadono Sukirno (2007: 256-257) memandang bahwa pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Menurut Harrod Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan peningkatan efektif seluruh masyarakat. Untuk meningkatkan laju perekonomian maka diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok tambahan modal. Harrod Domar menjelaskan bahwa antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif, sehingga dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan ekonomi produktif.

2.1.4.3 Jenis-jenis Investasi

Menurut Sunariyah (2004:4), investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian utama, yaitu:

a. *Real Investment*

Real investment merupakan investasi nyata yang secara umum melibatkan asset berwujud seperti tanah, mesin-mesin atau pabrik.

b. *Financial Investment*

Financial investment investasi keuangan yang secara umum melibatkan asset kontrak tertulis seperti saham biasa (*common stock*) dan obligasi (*bond*). Pilihan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara:

a) Investasi langsung (*direct investment*)

Investasi langsung dapat diartikan sebagai suatu pemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah *go public* dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividen dan *capital gains*.

b) Investasi tidak langsung (*indirect investment*)

Investasi tidak langsung terjadi apabila surat-surat berharga yang dimiliki di perdagangkan kembali oleh perusahaan investasi yang berfungsi sebagai perantara. Pemilik aktiva tidak langsung dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan terdaftar, yang bertindak sebagai perantara atau *intermediary*. Dalam peranannya sebagai investor tidak langsung, pedagang, perantara mendapatkan dividen dan *capital gain* seperti dalam investasi langsung, selain itu juga akan memperoleh penerimaan berupa *capital gain* atas hasil perdagangan portofolio yang dilakukan oleh perusahaan perantara tersebut.

Perbedaan antara investasi riil dengan investasi finansial adalah tingkat likuiditas dari kedua investasi tersebut. Investasi riil lebih sulit untuk dicairkan karena terbentur pada komitmen jangka panjang antara investor dengan perusahaan.

Sementara investasi finansial lebih mudah dicairkan karena dapat diperjualbelikan tanpa terikat waktu.

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Investasi Pemerintah

Merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

b. Investasi Swasta

Merupakan investasi yang dilakukan oleh swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsi pun bertambah dan bertambah pula *effective demand*. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*.

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri di dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman modal dalam negeri dapat

dilakukan oleh perseorangan warga negara negeri, badan usaha negeri, dan atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri memberikan peranan dalam pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang, hal ini terjadi dalam berbagai bentuk. Modal investasi mampu mengurangi kekurangan tabungan dan melalui pemasukan peralatan modal dan bahan mentah, dengan demikian menaikkan laju pemasukan moda. Selain itu, tabungan dan investasi yang rendah mencerminkan kurangnya modal di negara yang keterbelakangan teknologi. Bersamaan dengan modal uang dan modal fisik, modal investasi yang membawa serta keterampilan Teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik-teknik produksi maju, dan lain-lain akan melatih tenaga kerja setempat pada keahlian baru. Hal ini pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi negara berkembang.

2. Penanaman Modal Asing PMA

Dalam literatur ekonomi investasi asing dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu investasi portofolio dan investasi langsung atau *foreign direct investment* di (FDI). Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan berupa pembangunan pembelian total atau mengakuisisi perusahaan. Menurut UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Penanaman Modal

Asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal negeri (Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal). Modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri berat dan industri strategis, adanya modal asing sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik dan sebagainya.

2.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

2.1.5.1 Definisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK adalah ukuran tingkat partisipasi penduduk dalam angkatan kerja yang memberikan ilustrasi yang jelas sejauh mana penduduk yang masuk ke dalam usia kerja benar-benar aktif dan tidak aktif dalam bekerja. Secara singkatnya TPAK merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja.

Penduduk dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja dalam Bab 1 menyatakan tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu bekerja dan melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan maksud memenuhi kebutuhan dirinya maupun untuk masyarakat luas, yang termasuk ke dalam golongan tenaga kerja yaitu penduduk yang sudah atau sedang bekerja,

mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga.

Batas usia yang membedakan tenaga kerja atau bukan tenaga kerja. Bank Dunia menyebutkan batas usia kerja adalah 15 tahun ke atas. Indonesia sendiri memiliki batasan pada usia kerja yaitu dari 10 tahun ke atas (1971-1999). Maksud dari pemilihan usia 10 tahun tersebut dikarenakan bahwa di daerah pedesaan banyak yang sudah bekerja mulai dari usia 10 tahun. Pada tahun 2001 Indonesia mulai mengikuti saran dari *International Labour Organization* (ILO) yaitu dengan mengubah batas minimum usia tenaga kerja dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Berikutnya, angkatan kerja menjadi salah satu faktor positif dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak partisipasi angkatan kerja yang bekerja akan meningkatkan tingkat produksi yang akhirnya memberikan dampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa kelompok dalam tenaga kerja, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berumur dalam batas usia kerja. Tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang berusaha untuk terlibat kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri golongan bekerja dan golongan bekerja serta mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari kerja.

Bukan angkatan kerja terdiri terdiri dari golongan yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan golongan lainnya atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Maka dari itu kelompok ini sering juga dinamakan sebagai angkatan kerja potensial. Angkatan kerja dalam suatu perekonomian digambarkan sebagai penawaran tenaga kerja yang tersedia dalam pasar tenaga kerja.

Angkatan kerja dibedakan menjadi dua kelompok yaitu bekerja dan menganggur. Pekerja adalah orang yang bekerja, mencakup orang mempunyai pekerjaan dan yang sedang bekerja serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu sedang tidak bekerja digolongkan ke dalam pekerja apabila waktu minimum bekerja yaitu selama satu jam selama seminggu yang lalu untuk kegiatan produktif sebelum pencacahan dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan menganggur minimal satu jam selama seminggu yang lalu sebelum dilakukan pencacahan.

Perumusan dalam TPAK yaitu persentase atas banyaknya penduduk yang bekerja dengan banyaknya penduduk yang termasuk dalam usia kerja. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) usia kerja diindikasikan pada usia 15 tahun ke atas. Dengan ini untuk menghitung TPAK menggunakan rumus:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{PK}}{\text{PUK}} \times 100\%$$

Dimana: PK = Penduduk yang bekerja

PUK = Penduduk usia kerja 15 tahun ke atas

2.1.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi TPAK

a. Jumlah penduduk bersekolah dan mengurus rumah tangga

Hubungan TPAK dan jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga adalah semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, semakin kecil jumlah angkatan kerja.

b. Tingkat umur

Usia berkaitan dengan TPAK. Semakin banyak usia produktif pada suatu negara akan menghasilkan penerus yang kreatif dan mampu membawa tanggung jawab dalam membangun bangsa dan negara.

c. Upah

Semakin tinggi tingkat upah di suatu daerah, membuat penduduk usia kerja di daerah tersebut tertarik untuk masuk ke dalam pasar kerja, secara tidak langsung TPAK juga akan meningkat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun kajian terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rifa'i, M. A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Persentase Kemiskinan melalui Pendapatan Perkapita di Negara Berkembang (Studi Kasus Negara Indonesia)	Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan penduduk berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pendapatan perkapita secara negatif dan signifikan.	Pertumbuhan penduduk Pendapatan perkapita	Kemiskinan	Central Library of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang
2	Mustika, C., Achmad, E., dan Umiyati, E. (2018). Dampak ekspor ke jepang dan investasi asing pendapatan perkapita masyarakat di Indonesia.	Nilai ekspor ke jepang berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB perkapita sementara variable FDI tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB perkapita.	Pendapatan perkapita Investasi	Ekspor ke Jepang	Jurnal Paradigma Ekonomika Vol 13 No 2 Juli-Desember 2018 ISSN: 2085-1960
3	Aidar, N. M. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Sektor	Belanja pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan belanja pemerintah sektor	Pendapatan perkapita	Belanja pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan	Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Pendapatan perkapita di Provinsi Aceh.	kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita Provinsi Aceh.			Volume 1 Nomor 2, November 2014 ISSN: 2442-7411
4	Kurniawan, A., dan Cahyono, H. (2019). Pengaruh Investasi Asing Langsung dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pendapatan perkapita Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi asing langsung tidak berpengaruh signifikan sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita di Indonesia.	Investasi Pendapatan perkapita	Pengangguran	Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 5 No 2 2017
5	Rumokoy, E. H., Engka, D. S. M., Walewangko, E. N. (2022). Pengaruh Sektor Basis dan Non-Basis Terhadap PDRB perkapita di Kabupaten Minahasa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor basis dan sektor non-basis berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB perkapita.	Pendapatan perkapita	Sektor basis Sektor non-basis	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 22 No 4 Bulan Mei 2022
6	Amri, K. (2014). Infrastuktur Transportasi dan Kepadatan Penduduk Dampaknya Terhadap Pendapatan Perkapita	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan perkapita sedangkan tingkat kepadatan penduduk berpengaruh negatif terhadap pendapatan perkapita	Pendapatan perkapita	Infrastruktur transfortasi Kepadatan penduduk	Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Volume 2 No 2 Desember 2014 Hal 438-4 50 ISSN: 2338-2929

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Masniadi, R. (2012). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tabungan, dan Investasi Terhadap Tingkat Pendapatan Perkapita Indonesia.	Tabungan dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif namun signifikan terhadap pendapatan perkapita	Investasi Pendapatan perkapita	Jumlah penduduk Tabungan	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 10 No 1 Juni 2012
8	Hardiningsih, P., Oktaviani, M.R. (2013). Determinan Belanja Modal dan Konsekuensi terhadap Pendapatan Perkapita (Studi Kasus Wilayah Jawa Tengah).	Jumlah Belanja Modal yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan perkapita Provinsi Jawa Tengah.	Pendapatan perkapita	Belanja modal	Simposium Nasional Akuntansi xvi Manado, 25-28 September 2013
9	Asmirawati (2017) Analisis Middle Income Trap di Indonesia	Ekspor produk berteknologi tinggi, tingkat pendidikan, rasio ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita, sedangkan investasi asing langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita	Rasio Ketergantungan Pendapatan perkapita	Ekspor produk berteknologi tinggi Tingkat pendidikan	Jurnal Ecosain, Vol. 6, No. 1, Mei 2017 Hal 1-14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Fahira, R., Andriyani, D. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Perkapita Provinsi Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita, upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita, dan lapangan kerja berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita.	Pendapatan perkapita	Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan Upah minimum provinsi Penyerapan tenaga kerja	Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi JAIE
11	Purba, S., Silalahi, M. (2019) Pengaruh Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau.	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan secara simultan belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.	Pendapatan perkapita	Belanja modal Pendapatan asli daerah Dana perimbangan	Jurnal Ilmiah Simantek ISSN. 2550- 0414 Vol. 3 No. 2 Mei 2019
12	Utami, H.R. (2013) Pengaruh Tenaga Kerja, Upah Minimum Regional	UMR dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB perkapita, sedangkan	PDRB perkapita	UMR PAD Tenaga kerja	Jurnal Economic Developme nt, Vol. 2,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(UMR), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsepur	tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB perkapita kabupaten/kota di Kawasan kedungsepur			No. 21. Tahun 2018
13	Febtiyanto, Y. (2016) Analisis faktor-faktor penentu Pendapatan perkapita sebagai upaya menghindari <i>Middle Income Trap</i>	Inflasi berpengaruh negatif dan juga signifikan terhadap pendapatan perkapita, NTP dan PMTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita sedangkan FDI memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita	Pendapatan perkapita	Inflasi Nilai tambah pertanian PMTB FBI	Faculty of Economics and Business, Tahun 2017
14	Hasbi. A.R., Salju AP. D.A (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Pendapatan Perkapita di Kabupaten Luwu Timur	Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita	Pendapatan perkapita	Pertumbuhan ekonomi Upah minimum	Equilibrium Volume 8. No.1 Tahun 2009 hal 45-63

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Khadijah S., (2018). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Pendapatan Perkapita di Kabupaten Pandeglang	Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pendapatan perkapita di Kabupaten Pandeglang berpengaruh signifikan	Pendapatan perkapita	Pertumbuhan penduduk	Jurnal Hukum Konomii Syariah, Vol 10. No 1, Tahun 2018

2.3 Kerangka Pemikiran

PDRB perkapita sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi PDRB perkapita maka dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Laju pertumbuhan penduduk, *dependency ratio*, investasi dan TPAK turut berkontribusi dalam upaya peningkatan PDRB perkapita.

2.3.1 Hubungan Laju Pertumbuhan Penduduk dengan PDRB Perkapita

Hubungan laju pertumbuhan penduduk pada pendapatan perkapita biasanya tidak terlalu menguntungkan. Laju pertumbuhan penduduk cenderung memperlambat pendapatan perkapita dalam tiga cara, memperberat beban penduduk pada lahan, menaikkan barang konsumsi karena kekurangan faktor pendukung untuk menaikkan penawaran mereka, memerosotkan akumulasi modal, karena dengan tambah anggota keluarga biaya meningkat. Sehingga, hubungan laju pertumbuhan penduduk adalah negatif terhadap PDRB perkapita.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khadijah (2018) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Pendapatan Perkapita Kabupaten Pandeglang”

menyatakan bahwa hubungan laju pertumbuhan penduduk negatif terhadap PDRB perkapita. Sehingga apabila laju pertumbuhan penduduk meningkat maka PDRB perkapita akan menurun. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan Rudi Masniadi (2012) dan E Wesley F Peterson (2017) menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pendapatan perkapita.

2.3.2 Hubungan Dependency Ratio dengan PDRB Perkapita

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis & Saputra (2016) menyatakan bahwa *dependency ratio* berpengaruh negatif terhadap pendapatan perkapita. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Nuryani & Julia (2022) yang menyatakan bahwa *dependency ratio* berpengaruh negatif terhadap pendapatan perkapita. Sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa jika nilai *dependency ratio* semakin menurun maka beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif juga akan menurun. Penelitian yang dilakukan Asmirawati (2015) menunjukkan bahwa *dependency ratio* berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita. Artinya *dependency ratio* tinggi, maka pendapatan perkapita menjadi tinggi.

2.3.3 Hubungan Investasi dengan PDRB Perkapita

Investasi atau pemodalannya merupakan persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat dihasilkan maupun diproduksi. Secara statistik tingkat investasi mengalami peningkatan 1% maka akan diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita sebesar 1,36%. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya tingkat investasi akan mempengaruhi besaran output yang pada akhirnya mempengaruhi

pendapatan perkapita. Oleh karena itu investasi berpengaruh positif terhadap PDRB perkapita.

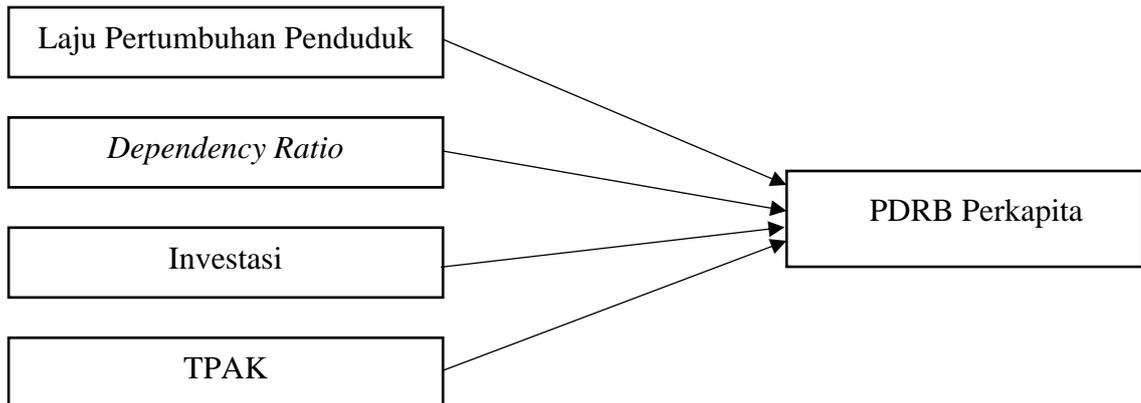
Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Masniadi, (2012) yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tabungan dan Investasi terhadap Pendapatan Perkapita Indonesia” menyatakan bahwa hubungan Investasi positif terhadap PDRB perkapita. Sehingga apabila Investasi meningkat maka PDRB perkapita meningkat. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan Saputra (2018) dan Budiarty (2022) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita.

2.3.4 Hubungan TPAK dengan PDRB Perkapita

Dalam penelitian yang dilakukan Nuryani & Julia (2022) menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Anwar (2019) yang menyatakan bahwa TPAK berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita. Tingkat partisipasi angkatan kerja menggambarkan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah.

Dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pendapatan perkapita di Indonesia. Artinya apabila tingkat partisipasi angkatan kerja semakin tinggi maka semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang maupun jasa dalam perekonomian sehingga pendapatan perkapita yang diterima oleh suatu wilayah mengalami peningkatan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Affandi (2019) menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh negatif terhadap pendapatan perkapita.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian tentang “Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, *Dependency Ratio*, Investasi, dan TPAK Terhadap Pendapatan Perkapita di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022” digambarkan dengan gambar skema sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori. Adapun beberapa hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial Investasi, TPAK berpengaruh positif dan *dependency ratio*, laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap PDRB perkapita di Provinsi Jawa Barat
2. Diduga secara bersama-sama laju pertumbuhan penduduk, *dependency ratio*, investasi dan TPAK berpengaruh terhadap PDRB perkapita di Provinsi Jawa Barat